

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa isu terorisme di dunia internasional sudah menjadi isu yang harus diperhatikan dan harus diberantas oleh seluruh negara di dunia. Salah satu koalisi gabungan negara – negara dunia Islam, yaitu IMCTC pada saat ini sedang melawan terorisme yang tersebar khususnya di wilayah Timur Tengah, umumnya di wilayah negara anggota lainnya. Aljazair adalah salah satu negara yang berada di wilayah Timur Tengah yang pada saat ini juga sedang berusaha dalam melawan terorisme yang cukup parah di internal negara maupun di luar negaranya, namun negara ini memiliki keputusan untuk menolak bergabung dengan koalisi IMCTC. Oleh karena itu, penulis menjadikan Aljazair sebagai subjek penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai alasan Aljazair memiliki suatu kebijakan untuk tidak bergabung dengan aliansi tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan mengkaji tentang negara Aljazair menolak untuk bergabung dengan koalisi anti teroris yang dibentuk pada tahun 2015. Aljazair adalah negara di wilayah afrika utara atau termasuk negara timur tengah yang memiliki konflik yang cukup banyak, terutama dengan keamanan negaranya, karena kelompok – kelompok pemberontak banyak yang muncul dari negara tersebut, seperti FIS (*Islamic Salvation Front*), GSPC (*Salafist Group for Preaching and Combat*), kemudian GSPC ini pada 11 september 2006 mengklaim bahwa kelompok ini adalah Al Qaeda maghreb (Mohammed Sergie contributed to the report, 2015).

Timur Tengah (termasuk wilayah Maghreb) adalah wilayah yang memiliki konflik yang kompleks, dimulai dari konflik internal negara yang disebabkan oleh perbedaan tafsir

atau ideologi sudah menjadi hal yang lumrah menjadikan hal tersebut menyebabkan adanya perselisihan. Selain itu, faktor yang terjadi karena beberapa alasan seperti ketidakpuasan masyarakat dengan kepemimpinan yang telah diterapkan, seperti ekonomi yang memburuk ataupun sistem pemerintahan yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan pemerintah disalahkan oleh masyarakatnya. Kemudian munculah kelompok – kelompok yang memiliki visi untuk menggulingkan pemerintahnya tersebut tetapi cara yang dilakukan banyak yang menggunakan kekerasan seperti memberontak, merusak properti atau fasilitas umum serta memberikan dampak terhadap keamanan masyarakat dan negara. Kejadian ini sudah mencapai titik dimana kelompok – kelompok pergerakan tersebut tidak dapat dikontrol lagi.

Kelompok yang dimaksud adalah kelompok teror atau terorisme. Definisi tentang terorisme yang diberikan oleh Konvensi Arab untuk Penindasan Terorisme menyatakan bahwa terorisme adalah setiap tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif atau tujuannya, yang terjadi dalam kemajuan individu atau kolektif agenda kriminal dan berusaha untuk menabur kepanikan di antara orang-orang, menyebabkan rasa takut dengan melukai mereka, atau menempatkan hidup mereka, kebebasan atau keamanan dalam bahaya, berusaha untuk menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau ke instalasi publik, swasta, properti atau untuk menduduki atau menyita mereka dan berusaha membahayakan sumber daya nasional (Jide Ibietan F. C., 2014).

Terorisme adalah salah satu isu internasional yang selalu menjadi perhatian masyarakat global, isu ini juga menjadikan khususnya wilayah timur tengah sebagai pusat munculnya kelompok teroris, pada awalnya gerakan ini muncul karena adanya gerakan nasionalis tetapi semenjak terjadinya peristiwa serangan 11 September 2001, George Bush atau presiden Amerika pada periode saat itu menyatakan bahwa "Perang Melawan Teror" adalah salah satu prioritas Amerika Serikat.

"Perang" ini berlanjut untuk akhirnya mengubah sifat kebijakan nasional dan internasional mereka. Serangan yang dilakukan sudah diakui oleh kelompok Al Qaeda yang menjadi pelaku penyerangan tersebut (Jide Ibieta P. F., 2014). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa misi kelompok ini tidak sebatas untuk kepentingan di wilayah nasional tetapi sudah meluas, yaitu memiliki misi untuk bergerak ke ranah internasional.

Al-Qa'ida atau Maghrib Islam (AQIM) secara resmi lahir pada Januari 2007 ketika Kelompok Salafis Aljazair untuk Berkhotbah dan Memerangi (*GSPC / Groupe Salafiste pour la Predication et le Combat*) bergabung menjadi al-Qa'ida di Afrika Utara. Al-Qaida kemudian memperluas jaringan operasinya ke arah Barat yaitu negara-negara Eropa, terutama Prancis dan Spanyol. Selain itu, sebelum AQIM menghantam jantung pusat ibu kota Aljazair pada 11 April 2007, tiga serangan bunuh diri serentak menghantam istana pemerintah dan dua pos keamanan. Serangan ini dirayakan oleh al-Qa'ida sebagai *Badr of Maghrib*, adapun serangan teror di Riyadh pada November 2003 (Filiu, 2009).

Selain itu kelompok teroris yang berasal dari timur tengah adalah ISIS dan ISIL adalah kelompok yang sama diterjemahkan sedikit berbeda (Negara Islam Irak dan Suriah atau Negara Islam Irak dan Levant), ISIS adalah kelompok teroris Islam radikal yang terpecah dari al-Qaeda dan berbasis di Suriah (University of Maine Raymond H Fogler Library , 2018) . Pada 20 Juni ISIS mengklaim telah melakukan pemboman mobil terhadap sebuah masjid Syiah di Sanaa yang menewaskan dua orang dan melukai 16 lainnya, dan satu lagi di ibukota Yaman empat hari sebelumnya yang menewaskan 31 orang (TAgence France-Presse in Sanaa, 2015). Boko Haram juga termasuk kelompok yang sudah ditandai oleh PBB bahwa kelompok ini sudah menjadi jaringan teroris yang berasal dari Nigeria.

Negara – negara di Timur Tengah dan di kawasan lain berinisiatif dengan membentuk organisasi internasional untuk melawan isu terorisme atau keamanan negara, seperti OIC (*The Organisation of Islamic Cooperation*), PBB, OAU (*The Organisation of African Unity*). Kemudian pada tahun 2015 muncul koalisi baru yang di gagas oleh Arab Saudi yaitu IMCTC (*Islamic Military Counter Terrorism Coalition*), tujuan dari pembentukan koalisi tidak lain untuk mengintensifkan upaya dalam memerangi terorisme melalui kerjasama dengan pusat operasi gabungan yang berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer. Jumlah negara yang bergabung sejauh ini adalah 41 negara yang berasal dari negara Afrika dan Asia (terutama Timur Tengah) (*The Royal Embassy of Saudi Arabia in Roma, 2017*).

Negara Mesir adalah salah satu negara yang memilih untuk bergabung karena berkaca dari tragedi serangan bom bunuh diri dan serangan brutal di masjid Al – Rawdah di Sinai Utara Mesir. Bertepatan pada waktu selesai sholat Jumat yang menewaskan lebih dari 300 orang, ini yang menjadi salah satu tujuan Mesir ikut bergabung dengan aliansi tersebut. Adapula beberapa negara yang menolak untuk bergabung dengan aliansi tersebut, salah satu negara yang menolak adalah negara Aljazair.

Negara Aljazair memilih untuk tidak ikut bergabung dengan koalisi yang di bentuk oleh arab sudi, padahal tujuan koalisi dibentuk untuk memberantas teroris di wilayah negara – negara Islam dan Aljazair termasuk negara yang memiliki konflik yang disebabkan oleh kelompok – kelompok yang mengklaim *Djihadists* atau teroris.

B. Rumusan Masalah

Mengapa negara Aljazair menolak untuk bergabung dengan koalisi anti teroris yaitu IMCTC (*Islamic Military Counter Terrorism Coalition*) pada tahun 2015?

C. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi kali ini penulis akan mengambil teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dengan menggunakan Model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison, teori tersebut digunakan karena sesuai untuk mendeskripsikan isu yang dibahas dalam pembuatan skripsi ini. Untuk memahami teori Kebijakan Luar Negeri dan proses pembuatan sebuah kebijakan luar negeri maka perlu ada pemahaman terkait pengertiannya. Pengertian Kebijakan Luar Negeri yang di kemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton adalah :

“ Foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of state and vis a vis other states or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest. A specific foreign policy carried on by a state may be the result of an initiative by that state or may be a reaction to initiative undertaken by other states ” (Olton, 1969) .

Pengertian yang dimaksud bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau program yang direncanakan ataupun strategi yang dikembangkan oleh pengambil keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain serta untuk entitas internasional yang bertujuan mencapai tujuan spesifik dan didefinisikan dalam hal kepentingan nasional atau adanya kebijakan luar negeri tidak lain memiliki tujuan untuk mencapai suatu kepentingan nasional.

Kebijakan politik luar negeri juga merupakan keputusan suatu negara dalam melihat suatu fenomena internasional yang didasarkan pada kepentingan nasional negara tersebut dan strategi yang telah direncanakan oleh para pembuat kebijakan. Dikutip dari (Zakky, 2018) mengenai definisi lain politik luar negeri (*foreign policy*) yaitu merupakan strategi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan

memajukan kepentingan nasional negara tersebut di dalam kancah dunia internasional. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kebijakan dan strategi politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional masing masing negara.

Pembuat kebijakan luar negeri dalam memutuskan sebuah kebijakan mempertimbangkan adanya kepentingan nasional negara. Selain itu, pembuat kebijakan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Model Aktor Rasional merupakan bagian atau instrumen dari *Rational Choice* (pilihan rasional), model ini menempatkan negara sebagai sebuah aktor utama dalam pengambilan keputusan. Kepentingan nasional dan keamanan nasional adalah salah satu faktor dipertimbangkannya keputusan kebijakan luar negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Graham T. Allison dibawah ini :

“ Politik Luar Negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan – tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Dalam model aktor rasional pembuatan keputusan digambarkan sebagai suatu proses intelektual, dimana pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah, dalam politik luar negerinya harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif yang mengarah ke kebijaksanaan yang bisa diambil pemerintah, dengan perhitungan untung rugi atas alternative itu perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi ” (Mas'oed, 1994).

Sebagai bagian dari pembuatan kebijakan luar negeri, Graham T. Allison juga berkata bahwa “*National security and national interest are the principal categories in which strategic goals are conceived. National seeks security and range of other objectives*” . Pada setiap pembuatan kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan aktor domestik yang berasal dari berbagai institusi dan memiliki kepentingan, sehingga

menyebabkan tarik menarik kepentingan. Namun, dengan adanya kepentingan – kepentingan yang ada dapat menghasilkan suatu kebijakan yang diyakini dapat memenuhi atau menghasilkan kepentingan nasional berdasarkan pertimbangan dan konsekuensi dalam memutuskan suatu kebijakan tersebut. Graham T. Allison juga mengatakan bahwa “*governments select the action that will maximize strategic goals and objectives*”. (Allison, *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*, 2001). Yang dimaksud adalah pemerintah akan memilih keputusan atau tindakan yang akan memaksimalkan sasaran strategis dan objektif.

Model aktor rasional ini membuat pemerintah memilih tindakan yang akan memaksimalkan tujuan dan sasaran strategi. Adapun konsep pengorganisasian agar penyusunan teori ini lebih jelas dan terstruktur, yaitu :

- a. *National Actor*, disini aktor rasionalnya adalah pemerintah atau bangsa yang dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional, aktor ini memiliki satu set tujuan yang sebelumnya telah ditentukan serta memiliki konsekuensi yang lebih sedikit dari pilihan – pilihan yang ada.
- b. *The Problem*, adanya masalah menggerakkan suatu negara untuk membuat pilihan yang strategis bagi kebaikan negaranya.
- c. *Static Selection*, suatu kegiatan yang relevan dengan suatu masalah merupakan apa yang telah dipilih oleh negara sebagai solusi. Dengan demikian tindakan tersebut dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari pilihan – pilihan yang lainnya.
- d. *Action as Rational Choice*, tindakan atau keputusan adalah pilihan yang rasional. Komponen – komponen dari tindakan rasional ada 4, yaitu :

No	Komponen	Penjelasan
1	Sasaran dan tujuan	Keamanan nasional dan kepentingan nasional adalah kategori utama di mana tujuan strategis disusun. Bangsa-bangsa mencari keamanan dan berbagai tujuan lebih lanjut.
2	Opsi	Berbagai program tindakan yang relevan dengan masalah strategis.
3	Konsekuensi	Pemberlakuan setiap tindakan alternatif akan menghasilkan serangkaian konsekuensi. Konsekuensi yang relevan merupakan manfaat dan biaya dalam hal sasaran strategis.
4	Pilihan	Pilihan rasional adalah pemaksimalan nilai. aktor rasional memilih alternatif yang konsekuensinya berperingkat tertinggi dalam hal tujuan dan sasarannya.

Table 1. 1 Konsep dari Model Aktor Rasional

Model aktor rasional ini memiliki sifat stokastik atau peluang, ketika negara memutuskan pilihan atau kebijakannya maka ini akan menjadi suatu peluang yang mungkin menurut negaranya suatu pilihan tersebut akan menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya (Allison, *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*, 2001, hal. 694).

Model aktor rasional yang di gagas oleh Graham T. Allison adalah salah satu cara negara dalam memutuskan kebijakan luar negerinya, semua pengambilan keputusan dipilih oleh pemerintah sebagai bentuk kebijakan yang mengetahui tindakan strategis. Kepentingan nasional dan keamanan nasional adalah hal yang utama dalam membuat atau menyusun kebijakan luar negeri. Teori aktor rasional merupakan teori yang digunakan untuk menjawab terkait apakah keputusan yang diambil terbaik dan dapat dikatakan berhasil untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkungan internasional. Adapun pernyataan dari Stephen M. Waltz dalam jurnalnya bahwa yang pertama, teori pilihan rasional bersifat individu yaitu hasil – hasil sosial dan politik dilihat sebagai alat kolektif atas pilihan individu yang dibuat oleh aktor kesatuan, aktor kesatuan yang dimaksud bisa dengan aktor negara. Waltz mengasumsikan bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingan dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya (Mustikasari, 2013).

Pada intinya teori menggunakan aktor rasional ini dapat membuat kesimpulan logis tentang negara (aktor) dalam membuat keputusan. Teori pilihan rasional digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis apa maksud dan tujuan dari negara, dan untuk menganalisis *cost* dan *benefit* dari pilihan yang dilakukan negara untuk mencapai kepentingannya ataupun negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan yang memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai (*goals and objectives*).

Aljazair adalah salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dan termasuk negara Timur tengah (Maghreb) yang memiliki masalah internal yang cukup parah, dimana telah terjadinya bentrok pemerintahan dengan kelompok yang tidak sepaham dengan pemerintahan yang telah ada, banyak kelompok yang mengaku bahwa mereka adalah *Djihadists*. Seperti adanya kelompok GSPC (*Salafist Group for Preaching and Combat*), kemudian GSPC ini pada 11 september 2006 mengklaim bahwa mereka adalah Al Qaeda maghreb (Mohammed Sergie contributed to the report, 2015). Ini adalah salah satu sumber masalah yang terjadi diranah internal negara.

Bantuan dan usaha sudah dikerahkan oleh pihak pemerintahan untuk melawan dan memperbaiki masalah internal, salah satu contohnya juga seperti negara Republik Yaman dengan pemberontak Houthi yang ingin menggulingkan presidennya (Lembaga Kajian Syamina, 2015). Konflik di wilayah domestik dan internasional khususnya di timur tengah dan afrika mengalami konflik saudara yang mengakibatkan korban masyarakat sipil dan cukup sulit untuk di perbaiki.

Kemudian salah satu usaha untuk memerangi konflik adalah Kerajaan Arab Saudi yang menggagas atau menginisiasi pembentukan aliansi negara – negara muslim di wilayah Timur Tengah, Afrika dan Asia. IMCTC adalah aliansi yang digagas oleh Arab Saudi pada Desember 2015, tujuan dari pembentukan aliansi tidak lain untuk mengintensifkan upaya dalam memerangi terorisme melalui kerjasama dengan pusat operasi gabungan yang berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer. Sejauh ini 41 Negara dari

wilayah Timur Tengah, Afrika dan Asia telah bergabung (IMCTC, 2017).

Ketika negara bergabung dengan suatu organisasi, tentunya akan memiliki keuntungan dan manfaat sesuai dengan visi yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Ketika negara Aljazair memutuskan untuk bergabung maka negara ini akan memiliki keuntungan seperti :

1. Negara Aljazair dan negara anggota lainnya akan lebih berkontribusi dan bekerjasama dalam memerangi terorisme, terutama di wilayah negara anggota IMCTC.
2. Kemudian kerjasama ini akan lebih memudahkan komunikasi dalam perencanaan dalam memerangi terorisme apabila negara – negara Islam bersatu.
3. Meningkatkan persaudaraan dan meminimalisasi konflik antara negara – negara anggotanya.
4. Negara Aljazair dan negara anggota lainnya akan mudah untuk memerangi atau mencegah terkait pendanaan terorisme melalui kerjasama antara negara – negara Islam, negara – negara didunia dan legitimasi internasional untuk mematuhi konvensi internasional dan untuk mengembangkan kerangka kerja hukum, peraturan dan operasional.
5. Meningkatkan kontribusi negara – negara dunia Islam untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam upaya memerangi terorisme (mengutamakan diwilayah negara anggota).

6. Meningkatkan solidaritas dan kerjasama Islam dan ikatan persaudaraan antara negara – negara anggota aliansi.

Meskipun poin – poin tersebut adalah salah satu kebaikan yang memiliki cita – cita perdamaian, tetapi negara Aljazair memilih untuk menolak bergabung dengan aliansi tersebut, penolakan terjadi bukan semata – mata hanya menolak begitu saja tetapi tentunya berkaitan dengan rasionalitas dan keuntungan yang lebih rasional untuk mencapai tujuan kepentingan nasional maupun keamanan nasional negaranya.

Aljazair adalah salah satu negara yang memiliki konflik internal dari setelah kemerdekaan dan sampai saat ini masih berusaha untuk memulihkan dan menciptakan keamanan dan perdamaian di internal negaranya. Bahkan melihat kondisi yang ada dalam negaranya Presiden Bouteflika yang terpilih pada tahun 1999 dan terpilih kembali selama lima tahun pada tahun 2004. Memiliki program yang meliputi pemulihan perdamaian dan keamanan sebagai prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan di negara tersebut untuk menegaskan kembali posisinya secara internasional. Program yang menjadi sasaran utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi masyarakat dan pemulihan perdamaian di negaranya. Hal tersebut menjadikan pertimbangan yang cukup besar bagi Aljazair karena dengan mementingkan atau mengutamakan untuk memperbaiki internal dan keamanan negara akan membuat negara ini lebih fokus untuk menyelesaikan masalah internal tersebut.

Kemudian dalam memerangi konflik di negara non regional, Aljazair memiliki kebijakan luar negerinya yaitu tertera dalam konstitusi yang diterapkan semenjak Aljazair merdeka pada 4 Juli tahun 1962 bahwa negara ini mengadopsi kebijakan luar negeri yaitu Revolusi Aljazair yang dirumuskan dalam kerangka Program Tripoli Juni 1962 yang memiliki beberapa prinsip yang dirangkum dalam mendukung hak masyarakat atas penentuan nasib sendiri, tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain dan penyelesaian damai perselisihan. Prinsip-prinsip ini, yang mengabdikan komitmen negara Aljazair untuk kebijakan luar negeri terhadap perjuangan melawan imperialisme dan dukungan gerakan pembebasan di dunia.

Alasan Revolusi Aljazair juga diperkuat bahwa Aljazair mengabdikan prinsip-prinsip non-alignment dan non-partisipasi dalam setiap intervensi militer di luar perbatasan Aljazair. Pasal 90 Konstitusi 1976 menyatakan "Sesuai dengan prinsip dan tujuan Gerakan Non-Blok, Aljazair akan berusaha untuk perdamaian, koeksistensi damai dan non-gangguan dalam urusan internal Negara". Kemudian pada Pasal 89 menyatakan bahwa tentara Aljazair tidak akan berpartisipasi di luar perbatasan Aljazair (Qat Samir - Dosen, 2017). Asumsinya dengan tidak ikut campurnya negara Aljazair ini memberikan poin yang penting bagi keamanan negaranya, yaitu mengusahakan untuk menghindari atau membuat negara lain berfikir ulang untuk mencoba mengintervensi negara Aljazair.

Pada dasarnya negara Aljazair memiliki komitmen untuk tidak mengintervensi negara lain, kecuali membantu di ranah regionalnya (negara – negara Afrika). Ketika memang adanya kerjasama dengan negara lain, itu

merupakan kerjasama yang real tanpa adanya kecenderungan Aljazair memilih untuk berpihak kepada negara manapun.

Benefit atau keuntungan negara Aljazair dalam menolak bergabung dengan aliansi militer yang digagas oleh Arab Saudi adalah negara ini memang mengutamakan keuntungan demi keamanan dan kepentingan nasionalnya. Pilihan rasional adalah memaksimalkan nilai atau keuntungan. Aktor rasional memilih alternatif yang konsekuensinya menduduki peringkat tertinggi dalam hal tujuan dan sasarannya.

D. Argumen Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan jawaban sementara atau argumen penelitian yaitu :

Negara Aljazair menolak untuk bergabung dengan koalisi anti teroris (IMCTC) pada tahun 2015 karena sikap tersebut adalah pilihan rasional Aljazair. Aljazair akan mendapatkan keuntungan, yaitu :

1. Pemerintah Aljazair bisa berfokus terhadap perbaikan internal dan keamanan negaranya.
2. Pemerintahan Aljazair menganut gerakan non blok yang berupaya menghindarkan konflik akibat intervensi negara luar.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif. Penelitian

ini menggunakan pendekatan dengan ranah jangkauan yang luas. Penulis lebih spesifik menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai topik pembahasan penulisan yang diperoleh dengan menggunakan teknik data sekunder yaitu dengan mencari melalui buku juga media massa seperti internet (jurnal, artikel, surat kabar harian nasional, internasional) dan mengumpulkan bahan-bahan perkuliahan yang telah didapatkan selama ini mengenai konflik di Timur Tengah dan Afrika seperti Aljazair. Kemudian tentang Aliansi (IMCTC) dan tujuan dibentuknya aliansi tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan Aljazair menolak bergabung dengan koalisi IMCTC pada tahun 2015.

Kemudian, memperkaya kajian Hubungan Internasional mengenai Timur Tengah, keadaan internal negara Aljazair, Isu Terorisme, Organisasi Internasional seperti *Islamic Military Counter Terrorism Coalition* (IMCTC).

G. Jangkauan Penelitian

Sebagai upaya untuk menghindari perluasan dalam fokus pembahasan dan meminimalisasi pokok permasalahan yang diangkat dalam penyusunan proposal, maka penulis berinisiatif memberikan batasan pada pokok pembahasan pada tulisan ini dari tahun 2010 sampai tahun 2018, dimana pada tahun 2015 adalah keputusan Aljazair menolak bergabung dengan IMCTC. Pokok – pokok permasalahan yang akan diangkat adalah penyebab Aljazair menolak bergabung dengan koalisi IMCTC dan

tujuan dibentuknya aliansi tersebut kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh Aljazair terkait penolakan untuk bergabung dengan koalisi tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi dari tulisan skripsi ini. Berikut sistematika penulisan yang terdiri dari :

Pada BAB I penulis akan membahas pendahuluan yaitu untuk memberikan argumen – argumen yang memperkuat landasan berpikir penulis dalam menentukan hal – hal apa saja yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini dan bagaimana cara menganalisis di bab selanjutnya. Adapun bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II penulis akan membahas tentang isu terorisme di Timur Tengah dan di Aljazair. Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian terorisme, isu terorisme di wilayah Timur Tengah. Pada bab ini juga membahas tentang isu terorisme di Aljazair.

BAB III penulis akan membahas tentang organisasi anti teroris *Islamic Military Counter Terrorism Coalition* (IMCTC). Pada bab ini penulis membahas tentang IMCTC meliputi latar belakang pendirian, anggota IMCTC, ruang lingkup IMCTC, tujuan dibentuknya IMCTC, prinsip – prinsip strategi IMCTC dan sistem operasionalnya.

BAB IV penulis akan membahas faktor – faktor penolakan Aljazair bergabung dengan koalisi anti teroris *Islamic Military Counter Terrorism Coalition*. Pada bab ini penulis akan membahas pembuktian argumen penelitian dengan menggunakan analisa teoritik. Penulis akan menunjukkan hasil penelitian dengan menggunakan data – data yang telah didapatkan terkait faktor – faktor yang melatarbelakangi

kebijakan Aljazair memilih untuk menolak bergabung dengan IMCTC.

BAB V penulis akan membahas kesimpulan pada bab ini penulis membahas rangkuman atau kesimpulan yang didapatkan dari bab – bab pembahasan diatas. Bab ini juga akan disertai dengan paragraf penutup sebagai ini pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.